

HAMBATAN PENCAPAIAN TARGET DAYA BELI SEBAGAI PEMBENTUK KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA BARAT*

Yuhka Sundaya**

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk [1] mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang signifikan di dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan Jawa Barat, [2] mengkaji dampak pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berurutan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan, penggunaan faktor produksi dan perluasan kesempatan kerja, dan [3] mengidentifikasi kondisi yang menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target daya beli melalui peningkatan pendapatan. Penulis menggunakan studi literatur, utamanya terhadap penelitian terkini yang menggunakan pendekatan Social Accounting Matrices (SAMs) dan penelitian yang terkait dengan distribusi pendapatan. SAMs dapat menggambarkan makroekonomi Jawa Barat pada waktu tertentu. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat menggambarkan hubungan sosial dan ekonomi di antara berbagai institusi, termasuk institusi pemerintah dan rumah tangga. Hasil dari ketiga kajian itu menunjukkan, pertama, di dalam sistem produksi, pendapatan rumah tangga miskin peka terhadap output beberapa sektor ekonomi, seperti : [a] pertanian, [b] industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau, [c] konstruksi/bangunan, [d] perdagangan, hotel dan restoran, dan [e] jasa-jasa. Kedua, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bias terhadap pendapatan rumah tangga kaya di perkotaan dan pendapatan pemilik modal dalam sistem produksi, serta rendahnya dampak pengeluaran pemerintah terhadap perluasan kesempatan kerja. Dan terakhir, hambatan di dalam mencapai target daya beli rumah tangga miskin disebabkan oleh lemahnya distribusi pendapatan personal dan fungsional.

* Naskah Ungulan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007

** **Yuhka Sundaya, SE., M.Si.** Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba

Kata Kunci : daya beli, pendapatan rumah tangga miskin, pengeluaran pemerintah, sistem produksi, distribusi pendapatan personal, distribusi pendapatan fungsional, SAMs, model, dan multiplier effect.

1 Pendahuluan

1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang mempertimbangkan manusia tidak hanya sebagai alat (*means*), tetapi sebagai akhir dari seluruh proses pembangunan. Seluruh upaya dalam pembangunan ekonomi diarahkan kepada orang dan kesejahteraannya yang dipertimbangkan menjadi tujuan utama pertumbuhan ekonomi, dan hanya diperlakukan sebagai pelaku pembangunan ekonomi suatu negara. (Sengupta, 2002 : 171).

Dipicu oleh Konferensi Tingkat Tinggi Milenium PBB yang menetapkan dan menyepakati tujuan pembangunan millennium (*millennium development goals* - MDGs), maka *concern* Pemerintah Indonesia terhadap kualitas pembangunan manusia semakin meningkat.¹ Begitupun halnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang meresponnya dengan menetapkan misi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam menunjang visi yang dibangun, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa, Jawa Barat sebagai Provinsi Ter maju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.

Concern Pemprov Jabar diperkuat lagi dengan ditetapkannya indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat. Dimulai dari Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Properda Pemprov Jabar) 2003 – 2007, Pemprov Jabar telah menetapkan Indikator Keberhasilan Pembangunan hingga tahun 2010. Selengkapya disajikan dalam Tabel 1.

¹ *Target yang terangkum dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan jender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan.*

Tabel 1. Target Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah, Jawa Barat, 2003 – 2010

Indikator	Target Numerik					
	2003	2004	2005	2006	2007	2010
1. IPM :	72.37	73.53	74.56	75.05	76.58	80
1.1. Indeks Pendidikan	80.2	81.2	82	81.5	83.6	85.4
1.2. Indeks Kesehatan	68.6	69.2	69.6	69.8	70	70.7
1.3. Indeks Daya Beli	68.2	70.2	72.3	74.2	76.3	83.6
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.24	2.22	2.16	2.14	2.08	1.95
3. Persentase Penduduk Miskin	19.61	19.13	18.64	18.14	17.65	16.07
4. Persentase Pengangguran	7.34	7.39	6.54	6.12	5.45	5
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.6	4.62	4.65	4.75	4.74	5.18
6. Jumlah Investasi (triliun Rp)	11.7	13.1	14.7	16.5	18.4	25.9
7. Persentase Kawasan Lindung	13	17	21	25	29	45

Sumber : Propeda Provinsi Jawa Barat, 2003 – 2007

Dalam perkembangannya hingga tahun 2005, ternyata hanya tiga indikator yang nampak berhasil dicapai, masing-masing adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pertumbuhan penduduk.

Dengan cara membandingkan Tabel 1 dan Tabel 2, sejak tahun 2004 realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melebihi target, sedangkan sejak tahun 2003 realisasi investasi telah melebihi targetnya. Dan target laju pertumbuhan penduduk berhasil dicapai pada tahun 2005. Sementara itu realisasi IPM, persentase penduduk miskin dan persentase pengangguran tampak semakin jauh dari targetnya. Di dalam komponen target IPM sendiri yang nampak sulit dicapai adalah target daya beli. Di mana gap antara realisasi dan target numerik daya beli lebih besar dari indeks pendidikan dan kesehatan. Daya beli memiliki peran penting di dalam membentuk IPM, di mana daya beli menunjang akses rumah tangga miskin terhadap jasa pendidikan dan kesehatan di dalam menunjang modal manusianya (*human capital*).

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat, 2003 – 2005

Indikator	Realisasi Numerik		
	2003	2004	2005
1. IPM :	67.87	68.36	69.35
1.1. Indeks Pendidikan	78.4	79.02	79.59
1.2. Indeks Kesehatan	66.57	67.23	69.28
1.3. Indeks Daya Beli	58.63	58.83	59.18
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.25	2.64	2.1
3. Persentase Penduduk Miskin	27.81	27.51	28.29
4. Persentase Pengangguran	12.69	12.25	11.91
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.39	5.08	5.31
6. Jumlah Investasi (triliun Rp)	36.51	40.52	61.44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Bapeda Provinsi Jawa Barat

Beranjak dari pengamatan ini tampak bahwa membaiknya beberapa indikator makroekonomi tidak diikuti oleh perbaikan kualitas pembangunan manusia dan kesempatan kerja. Padahal kebijakan dan program pembangunan yang mana pendanaannya dialokasikan dari APBD, telah diarahkan untuk mereduksi rumah tangga miskin. Demikian pula menurut Sengupta (2002 : 172) bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai indikator makroekonomi seharusnya memberikan pengaruh terhadap membaiknya kualitas pembangunan manusia yang diukur berdasarkan IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya, di mana indeks daya beli merupakan salah satu komponen pembentuknya.

Masalah ini terkait secara fungsional dengan peran pengeluaran pemerintah dalam makroekonomi Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal, memiliki fungsi secara umum sebagai alokator sumber daya, stabilisator perekonomian, dan redistributor kekayaan. Bahkan, di dalam beberapa dokumen perencanaan, Pemprov Jabar telah menunjukkan kebijakan yang pro terhadap rumah tangga miskin. Di mana

rumah tangga miskin merupakan obyek utama dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusianya.

1.2 Perumusan Masalah

Beranjak dari masalah yang disajikan dalam latar belakang masalah, maka pertanyaan yang dimunculkan adalah: "Apa yang menyebabkan target daya beli masyarakat sebagai salah satu pembentuk IPM sulit dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Barat?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah, maka penelitian ini ditujukan untuk :

- [1] Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang signifikan di dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di perdesaan dan perkotaan Jawa Barat, dan
- [2] Mengkaji dampak pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pendapatan rumah tangga miskin, penggunaan faktor produksi, dan penyerapan tenaga kerja.
- [3] Mengidentifikasi kondisi yang menghambat pencapaian target daya beli rumah tangga miskin di Jawa Barat.

Dengan tercapainya ketiga tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan peningkatan daya beli agar setiap upayanya tepat sasaran.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mendekati tujuan penelitian tersebut adalah studi literatur. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis telah memilih literatur yang merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan dan analisis *Social Accounting Matrices* (SAMs) atau Neraca Sosial Ekonomi (NSE) dan penelitian empiris yang terkait dengan distribusi pendapatan melalui berbagai program. SAMs dapat memberikan gambaran kegiatan transaksi dan transfer uang di antara

beberapa neraca seperti produksi, kelembagaan (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah), faktor produksi, komoditi, arus modal, dan ekspor – impor barang dan jasa dengan wilayah lainnya. Ringkasnya, SAMS dapat menggambarkan bekerjanya perekonomian secara menyeluruh (makroekonomi) suatu perekonomian atau wilayah termasuk

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Distribusi Pendapatan dan Peran Pemerintah

Masalah peningkatan daya beli rumah tangga miskin terkait dalam permasalahan distribusi pendapatan. Pendapatan dapat didistribusikan secara personal dan fungsional. Distribusi pendapatan secara personal merupakan transfer langsung dari suatu rumah tangga terhadap rumah tangga lain ataupun di antara anggota rumah tangga. Bantuan/subsidi langsung tunai merupakan contoh dari distribusi pendapatan personal yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan distribusi pendapatan fungsional terkait dengan kontribusi pemilik faktor produksi terhadap nilai tambah, seperti : tenaga kerja dan modal. (Hayami, 2001).

Persamaan pendapatan di antara rumah tangga biasanya diukur dengan distribusi pendapatan yang terkait dengan ukuran atau tingkat pendapatan per rumah tangga (atau anggota rumah tangga). Distribusi ini menjelaskan kelas ukuran pendapatan yang biasa disebut "ukuran distribusi pendapatan". Distribusi pendapatan dalam ilmu ekonomi dianalisis dalam terminologi pembagian pendapatan dari faktor produksi. Sebab, pembagian faktor mengukur pendapatan relatif dari faktor produksi, seperti : tenaga kerja dan modal, yang selaras dengan kontribusinya terhadap nilai tambah.

Menurut Hayami (2001:188-196) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan senjangnya distribusi pendapatan, yaitu perubahan dalam penggunaan faktor, struktur ekonomi dualistik, perbedaan pendapatan di sektor pertanian dan non pertanian, dan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Industrialisasi yang cenderung didorong oleh penggunaan faktor modal secara langsung menyebabkan *share* pendapatan pemilik modal menjadi lebih besar daripada *share* pendapatan tenaga kerja, dan karenanya dapat menurunkan pendapatan rumah tangga yang menawarkan jasa tenaga kerjanya dalam perekonomian.

Kemudian, jika industri skala besar dengan intensitas modal yang besar dipromosikan pada tahap di mana penawaran tenaga kerja relatif

berlimpah, maka perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah akan terjadi, atau disebut dengan "dual ganda". Selain itu, kesenjangan pendapatan dapat pula terjadi di antara sektor pertanian dan nonpertanian. Biasanya, sektor moderen cukup lemah di dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian. Karenanya, introduksi sektor moderen ke dalam perekonomian berpotensi untuk menciptakan kesenjangan pendapatan antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian moderen.

Kesenjangan pendapatan yang sering terjadi di negara-negara berkembang, memerlukan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah yang terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dikelompokan oleh Sadoulet (1995:4-5) ke dalam campur tangan berorientasi inefisiensi. Begitupun halnya dengan isu keadilan intergenerasi dan keberlanjutan (*sustainability*) dan kerawanan pangan.

2.2 Indikator dan Determinan Kualitas Pembangunan Manusia : Konsep Global dan Paradigma Pengukuran di Jawa Barat

Untuk menciptakan kontinuitas isu pembangunan manusia, ahli-ahli ekonomi telah mengembangkan konsep atau pengukuran kuantitatif yang mencerminkan pencapaian kualitas pembangunan manusia. Mengutip dari Mahbul-ul-Haq², menurut Datt (2002; xix) dalam laporan HDR 1990, terdapat empat ukuran pembangunan manusia, yaitu [1] indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI), [2] indeks pembangunan menurut jenis kelamin (IPJK) atau *gender – related development Index* (GDI), [3] indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *human poverty index* (HPI), dan [4] indeks pencapaian teknologi (IPT) atau *technological achievement index* (TAI). Indeks [2] hingga [4] dikembangkan untuk mengisi kelemahan-kelemahan pengukuran kualitas pembangunan manusia berbasis HDI.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sendiri menempatkan IPM sebagai indikator utama untuk melihat pencapaian target kualitas pembangunan manusia yang didorong oleh beragam implementasi

² Fakih (2001 : 64) mengatakan bahwa Mahbul Ul Haq adalah orang pertama yang mengangkat konsep kebutuhan dasar (*basic need*) di Bank Dunia.

kebijakan dan program pembangunannya.³ Melalui kebijakan pemerintah ini tidak berlebihan jika IPM menjadi paradigma pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

IPM mengukur rata-rata pencapaian dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :

- [1] Hidup yang sehat dan panjang yang diukur melalui angka harapan hidup pada kelahiran,
- [2] Pengetahuan yang diukur oleh tingkat melek huruf usia dewasa, dan dikombinasikan secara primer, sekunder dan tesier dengan lama sekolah secara kotor, dan
- [3] Standar hidup layak yang diukur oleh PDB per kapita.

Terkait dengan program UNDP, menurut Annapoorani (2002 : 161), HDI memiliki dua aspek, yaitu pencapaian aktual, dan mengukur target yang tidak tercapai. HDI diperoleh dengan melakukan perhitungan melalui rumus sebagai berikut :

$$\therefore DI_{yj} = [\max y - y_j] / [\max y - \min y] \quad [1]$$

$$\therefore DI_{ej} = [\max e - e_j] / [\max e - \min e] \quad [2]$$

$$\therefore DI_{Lj} = [\max L - L_j] / [\max L - \min L] \quad [3]$$

Di mana DI_{yj} , DI_{ej} , dan DI_{Lj} secara berurutan adalah index pembangunan (*development index*) untuk negara ke “j” dari pendapatan (y), angka harapan hidup (e), dan angka melek huruf (L). Max “y”, max “e”, dan max “L” adalah nilai maksimum untuk “y”, “e” dan “L” dan min “y”, min “e”, dan min “L” adalah nilai minimum untuk “y”, “e” dan “L”. Nilai maksimum dan minimum “y”, “e” dan “L” mengacu pada standar dari *United Nation Development Programe* (UNDP), sedangkan “ y_j ”, “ e_j ” dan “ L_j ” masing-masing adalah nilai aktual pendapatan, angka harapan hidup, dan angka melek huruf di negara “j”.

³ Sebagai contoh lihat Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2003 – 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2005 dan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD 2006

Setelah indeks pendapatan, angka harapan hidup dan angka melek huruf ditentukan melalui rumus [1] hingga [6], maka HDI secara kuantitatif diperoleh dengan rumusan berikut:

$$\therefore \text{HDI} = 1/3[\text{DI}_{yj} + \text{DI}_{ej} + \text{DI}_{lj}] \quad [4]$$

Subramanian (2002 : 82 – 88) menyimpulkan bahwa angka harapan hidup merupakan variabel dominan di dalam menentukan HDI, baik di negara yang HDI nya tinggi, menengah maupun rendah. Lebih lanjut ia menyarankan pentingnya pengeluaran atas sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan dalam memperbesar kualitas SDM, karena pengaruh angka harapan hidup dan rasio penduduk yang sekolah memiliki pengaruh paling besar terhadap HDI di masing-masing kelompok negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampaknya lebih menyandarkan indikator keberhasilan pembangunan manusia kepada IPM. Padahal dalam Propeda 2003 – 2007 secara sepintas, HPI atau indeks kemiskinan manusia (IKM) pernah dimunculkan sebagai tolok ukur pembangunan manusia. Namun, mencermati dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat saat ini, ukuran tersebut jarang dimunculkan. Pemprov Jabar saat ini nampak lebih *concern* dengan meminimalisasi kesenjangan ekonomi antara kabupaten/kota (kesenjangan regional). Walaupun demikian, dari sisi kebijakan Pemprov Jabar telah menunjukkan arah kebijakan yang bias atau pro terhadap penduduk miskin.

IPM sendiri memiliki kelemahan yang cukup besar. IPM tidak mencerminkan isu jender, kesenjangan antarkelompok rumah tangga menurut golongan pendapatan dan pencapaian teknologi sebagai input akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karenanya tidak mengherankan bahwa prestasi Pemprov Jabar di dalam mengejar IPM, pada pihak lain diwarnai oleh adanya kesenjangan ekonomi.⁴

Untuk mengakomodasi indikator kualitas pembangunan manusia yang lebih komprehensif, maka pemerintah harus melihat perkembangan GDI, HPI dan TAI.

⁴ Pada saat paper ini ditulis di salah satu televisi diberitakan beberapa kelompok rumah tangga di Kabupaten Garut yang rawan kelaparan, bahkan bulan-bulan sebelumnya diberitakan kelaparan penduduk di kaki gunung Manglayang Kabupaten Bandung. Dan tampaknya masih banyak fenomena serupa yang tidak terekam.

GDI menyesuaikan rata-rata pencapaian untuk merefleksikan kesenjangan antara jenis kelamin (pria vs wanita). Ada tiga komponen yang digunakan untuk mengukur GDI, yaitu :

- [1] Angka harapan hidup perempuan;
- [2] Angka melek huruf perempuan dewasa; dan
- [3] Pendapatan per kapita perempuan

Kesenjangan gender terjadi jika nilai GDI lebih rendah dari HDI.

HPI fokus kepada ketiadaan di dalam elemen yang esensial dari kehidupan manusia yang direfleksikan oleh HDI atau fokus pada elemen-elemen yang tidak diinkorporasi dalam HDI, seperti lama hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk beberapa negara OECD, pengukuran HPI didasarkan pada :

- [1] Kemungkinan kelahiran yang tidak bertahan hingga umur 60 tahun,
- [2] Persentase kurang fungsian melek huruf penduduk dewasa,
- [3] Persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan (US\$ 11 per hari – 1994 PPP), dan
- [4] Tingkat pengangguran jangka panjang (12 bulan lebih) atau determinan dari pengeluaran sosial.

Sebagai indikator terakhir, IPT bertujuan untuk menggambarkan seberapa baik suatu negara secara keseluruhan untuk berpartisipasi dalam penciptaan dan penggunaan teknologi. IPT didasarkan pada gagasan bahwa teknologi sebagai faktor yang kuat untuk menunjang pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. IPT menggunakan 4 dimensi dan 8 indikator untuk membangun indeks komposit. Selengkapnya di sajikan dalam Tabel 3.

Dengan tersedianya IPT, maka dapat diketahui apakah suatu negara itu termasuk ke dalam kelompok *leader technology*, *potential leader*, *dynamic adopter* atau *marginalised technology*. Tabel 3 menyajikan standar pengukuran kategorial IPT suatu negara.

Tabel 3. Dimensi dan Indikator Indeks Pencapaian Teknologi

No	Dimensi	Indikator
1	Penciptaan teknologi	a. Paten per kapita
		b. Penerimaan dari royalti dan ijin bebas
2	Penyebaran inovasi terkini	c. Kepemilikan internet per kapita
		d. <i>Share</i> ekspor teknologi menengah – tinggi dari keseluruhan ekspor
3	Penyebaran inovasi lama	e. Telepon per kapita
		f. Konsumsi listrik per kapita
4	Keahlian manusia	g. Rata-rata sekolah
		h. Rasio pendidikan kotor pada tingkat tersier dalam ilmu matematika dan teknik

Sumber : Datt (2002 : xxxii)

Tabel 4. Standar Pengukuran Kategori IPT

No	Kategori	Nilai IPT	Keterangan
1	Leader	> 0,5	Negara yang memiliki kemampuan untuk menemukan teknologi baru dan telah mencapai penciptaan dan penyebaran teknologi tingkat tinggi serta keahlian manusia yang tinggi
2	Potential Leader	0,35 – 0,49	Negara yang telah mengembangkan investasi tingkat tinggi dalam pembangunan manusia dan telah menyebarkan teknologi lama
3	Dynamic Adopter	0,20 – 0,34	Negara yang memiliki kemampuan cepat di dalam mengadopsi teknologi baru dan mengembangkan keahlian manusia yang tinggi
4	Marginalised	< 0,20	Bagian terbesar penduduknya tidak menerima manfaat dari adanya penyebaran teknologi lama.

Sumber : Datt (2002 : xxxiv)

3 Pembahasan

Untuk mengkaji bagaimana keragaan makroekonomi di Jawa Barat, dalam sub bab ini dikemukakan beberapa hasil penelitian terkini yang dilakukan oleh Atih dan Yuhka (2006) dan Mulyadi et, al (2006). Masing-masing peneliti menggunakan model dan metode komputasi *Social Accounting Matrices* (SAMs) atau Neraca Sosial Ekonomi (NSE).⁵ Atih dan Yuhka menggunakan SAMs Jabar 2002 yang di *update* dari SAMs Jabar tahun 1999, sedangkan Mulyadi *et. al* (2006) menggunakan SAMs Jabar 2003 yang di *update* dari SAMs Jabar 1999 dan 2002 yang digunakan oleh Atih dan Yuhka.

Sebagai ilustrasi, model yang dibangun Mulyadi *et. al* (2006) menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari permintaan akhir atas barang dan jasa yang memberikan stimulus atau *round impulse* terhadap perekonomian. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangga melalui cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, mekanisme transfer (distribusi pendapatan personal menurut Hayami (2001)), misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Secara tidak langsung (distribusi pendapatan fungsional), pendapatan rumah tangga miskin dapat berubah melalui sistem produksi yang distimulus oleh perubahan pengeluaran pemerintah.

⁵ SAMs adalah sebuah matrik yang merepresentasikan arus perputaran pendapatan. SAMs terkait dengan perbedaan antara barang dengan faktor. Barang memberikan kegunaan kepada konsumen, sedangkan faktor digunakan untuk memproduksi barang-barang. Dimana barang-barang itu dikategorikan sebagai barang antara (*intermediate goods*) dan barang akhir (*final goods*) yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh berbagai rumah tangga ekonomi. Barang antara merupakan faktor yang digunakan dalam kegiatan produksi rumah tangga produsen untuk memproduksi barang akhir. (Gibson, 2003;2). Selain itu menurut Abbaba (2004), SAMs menampilkan kegiatan ekonomi nasional dalam bentuk matrik yang menggambarkan bentuk dan lokasi kegiatan ekonomi, karakteristik dari teknologi, dan hubungan antara lembaga (institusi) ekonomi. SAMs tidak hanya memberikan informasi tentang pendapatan nasional dan neraca produk serta *table input-output*, tetapi juga mempertimbangkan arus uang antara institusi dalam kegiatan ekonomi (Thurlow, 2003;1). Sadoulet (1997) mengungkapkan bahwa SAMs adalah kerangka kerja yang efisien dan sederhana untuk mengelola data ekonomi dalam beberapa cara. SAM dapat menganalisis interaksi yang bersifat multisektoral termasuk di dalamnya unsur kelembagaan.

Perubahan permintaan akhir atas beragam barang dan jasa yang secara eksogen distimulus oleh pengeluaran pemerintah pada gilirannya direspon oleh sektor produksi atau sektor ekonomi di dalam sistem produksi (berapa besar masing-masing sektor produksi harus memenuhi jumlah barang dan jasa baru). Respon sektor produksi dalam upaya memenuhi satuan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh permintaan akhir dapat mengubah penggunaan faktor produksi termasuk di dalamnya tenaga kerja dan modal. Karenanya pendapatan rumah tangga pemiliki jasa tenaga kerja dan jasa modal akan terpengaruh oleh perubahan satuan produksi sektor ekonomi atau sektor produksi. Lebih lanjut, perubahan di dalam output sektor produksi pada gilirannya memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti bertambahnya sumber pendapatan baru bagi penduduk.

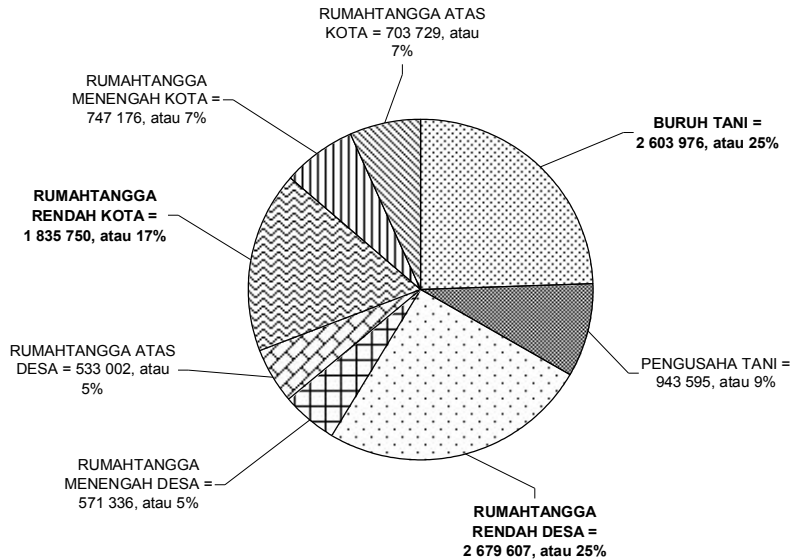
3.1 Faktor Penentu Pendapatan Rumah Tangga Miskin dalam Sistem Produksi di Jawa Barat

Atih dan Yuhka (2006) telah melakukan kajian khusus di Jawa Barat mengenai identifikasi sektor-sektor ekonomi yang mana kegiatannya memiliki dampak besar terhadap pendapatan rumah tangga miskin di perdesaan dan perkotaan Jawa Barat.

Kajian yang mereka lakukan fokus kepada rumah tangga buruh tani dan rumah tangga golongan pendapatan rendah di desa dan kota. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1999 golongan rumah tangga pendapatan rendah di desa lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga buruh tani dan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota. Dalam Gambar 1, tampak bahwa di Jawa Barat jumlah rumah tangga miskin masih lebih besar secara relatif terhadap rumah tangga golongan pendapatan menengah dan atas.

Mencermati kajian pendapatan dan alokasi pengeluaran setiap kelompok rumah tangga miskin tersebut, secara fungsional kehidupan ekonomi mereka ditentukan oleh sistem produksi di mana mereka menawarkan jasa kerjanya. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Jawa Barat, Atih dan Yuhka (2006) menggunakan analisis *multiplier effect output* sektor ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga miskin. *Multiplier effect* mencerminkan berapa besar perubahan pendapatan rumah tangga miskin sebagai akibat dari perubahan output sektor-sektor ekonomi atau sektor produksi.

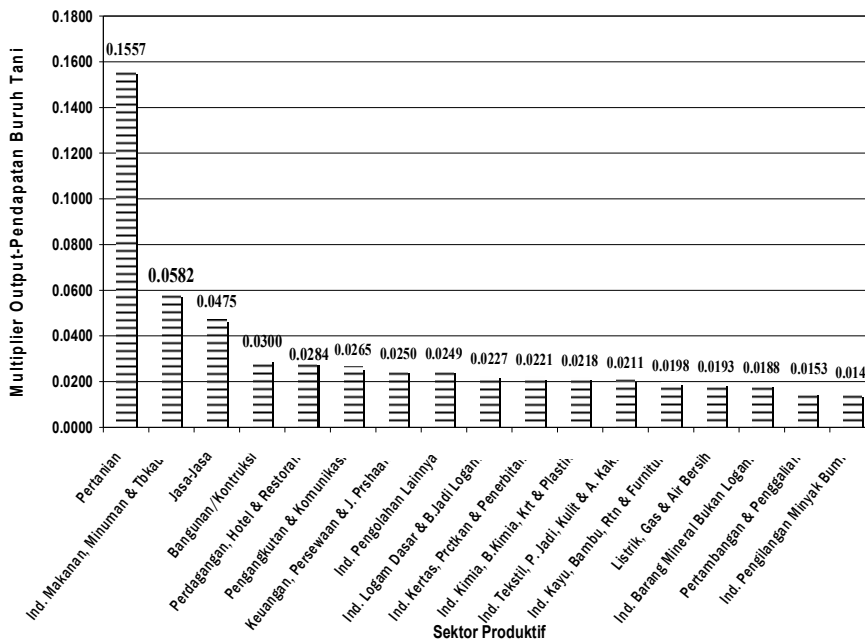
Gambar 1. Jumlah Rumah Tangga Berbagai Golongan Pendapatan di Desa dan Kota, Jawa Barat, 1999



Sumber : Atih dan Yuhka, 2006

Angka *multiplier effect* yang diilustrasikan dalam Gambar 2 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga buruh tani sangat peka terhadap perkembangan dan kinerja sektor pertanian. Setiap kenaikan *output* sektor pertanian dalam upaya untuk memenuhi permintaan akhirnya sebesar 1 milyar dapat meningkatkan pendapatan buruh tani hingga secara keseluruhan sekitar 155,7 juta rupiah.

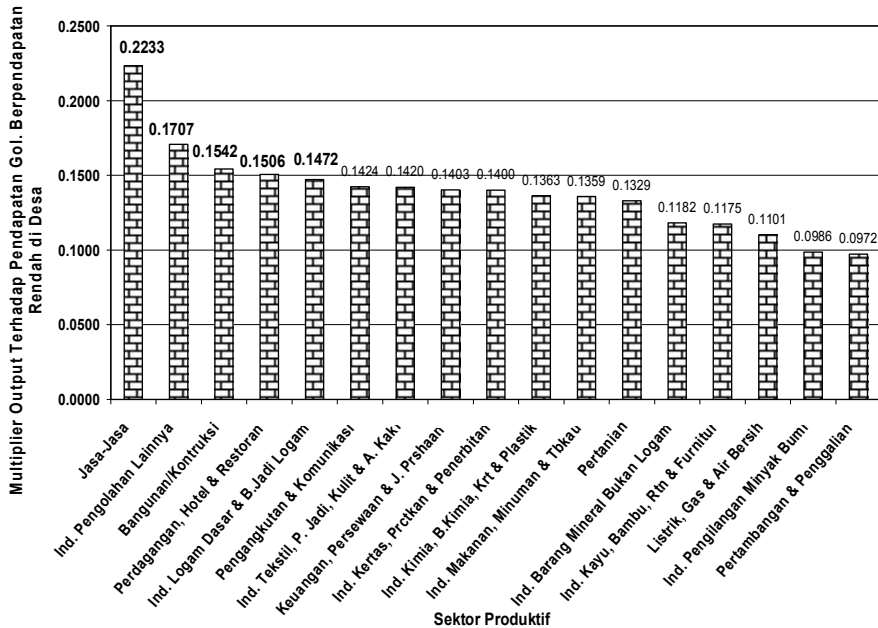
Gambar 2. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Buruh Tani, Jawa Barat, 2002



Sumber : Atih dan Yuhka (2006)

Sementara itu, pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota dan desa masing-masing nampak lebih peka terhadap perkembangan dan kinerja sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan lainnya.

Gambar 3. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Golongan Pendapatan Rendah di Desa, Jawa Barat, 2002



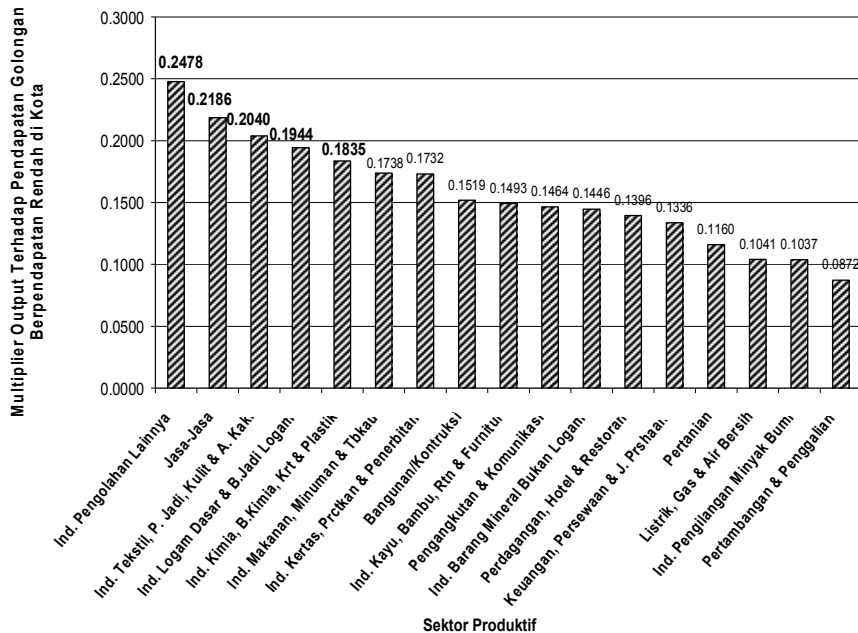
Sumber : Atih dan Yuhka (2006)

Melalui *multiplier effect* yang disajikan dalam Gambar 3, diidentifikasi bahwa sektor jasa-jasa memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di desa. Di mana setiap kenaikan output sektor jasa-jasa dalam upaya untuk memenuhi permintaan akhirnya sebesar 1 milyar dapat meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga secara keseluruhan ini sekitar 223,3 juta rupiah.

Lebih lanjut, melalui *multiplier effect* yang disajikan dalam Gambar 4, tampak bahwa sektor industri pengolahan lainnya memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota.

Setiap kenaikan output sektor industri pengolahan lainnya dalam upaya untuk memenuhi permintaan akhirnya sebesar 1 milyar rupiah saja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga ini secara keseluruhan hingga sekitar 247,8 juta rupiah, sedangkan sektor jasa sendiri dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga ini secara keseluruhan sekitar 218,6 juta rupiah dari kegiatan produksinya untuk memenuhi permintaan akhir.

Gambar 4. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Golongan Pendapatan Rendah di Kota, Jawa Barat, 2002



Sumber : Atih dan Yuhka (2006)

Pada bagian akhir kajian Atih dan Yuhka (2006), setelah melakukan berbagai simulasi, dikemukakan bahwa hendaknya pemerintah mengembangkan kelima sektor unggulan berikut :

- [1] Sektor pertanian;
- [2] Sektor industri makanan, minuman dan tembakau.
- [3] Sektor bangunan dan konstruksi; serta
- [4] Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- [5] Sektor jasa-jasa;

Sektor-sektor ini dipandang dapat memberikan dorongan perkembangan produk domestik bruto sektor lainnya, mencakup juga sektor industri pengolahan lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota.

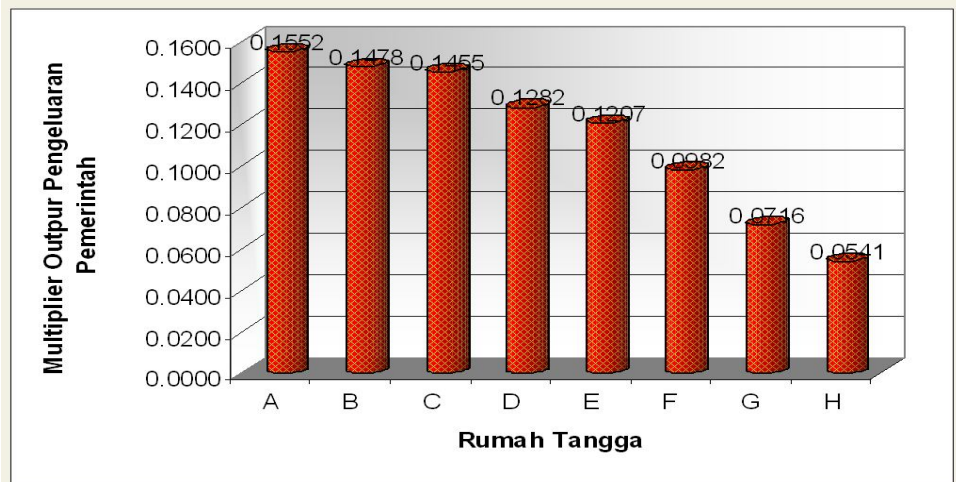
3.2 Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Rumah Tangga Miskin, Penggunaan Faktor Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat

Melalui penggunaan alat analisis yang serupa dengan Atih dan Yuhka (2006), Mulyadi *et. al* (2006) telah melakukan kajian mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan rumah tangga, penggunaan faktor produksi (tenaga kerja dan modal), dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Mulyadi *et. al* (2006) menggunakan SAMs yang telah mereka *update* ke tahun 2003.

Temuan pertama, berdasarkan analisis dampak pengganda (*multiplier effect*) ditemukan bahwa pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat nampak lebih bias terhadap kenaikan pendapatan rumah tangga golongan pendapatan atas di perkotaan. Seperti yang diilustrasikan oleh Gambar 5, ditunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga golongan pendapatan atas di perkotaan sebesar 155,2 juta rupiah.

Temuan kedua mengungkapkan bahwa pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampak lebih bias terhadap pendapatan pemilik modal dibandingkan dengan pendapatan tenaga kerja. Tabel SAMs menampilkan faktor produksi yang diklasifikasikan ke dalam faktor produksi modal dan tenaga kerja yang tersebar di sektor pertanian, industri dan sektor lainnya.

Gambar 5. Multiplier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Berbagai Kelompok Rumah tangga di Jawa Barat



Keterangan :

A =Rumah Tangga Golongan Atas di Kota,

B = Rumah Tangga Pengusaha Pertanian,

C = Rumah Tangga Golongan Rendah di Desa,

D = Rumah Tangga Golongan Rendah di Kota,

E=Rumah Tangga Buruh Tani,

F=Rumah Tangga Golongan Atas di Desa,

G=Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Kota,

H=Rumah Tangga Penerima Pendapatan di Desa.

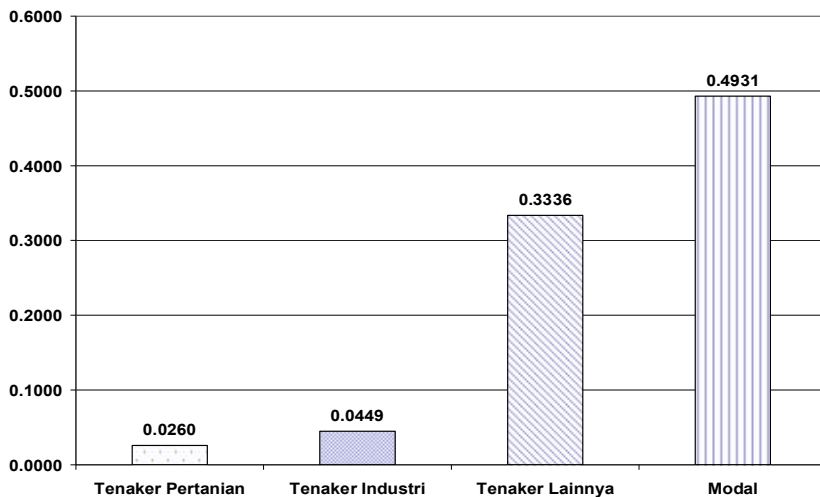
Sumber : Mulyadi et, al (2006)

Temuan ini menunjukkan bahwa di dalam memenuhi permintaan barang dan jasa akhir yang distimuli oleh pengeluaran pemerintah, sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat cenderung menggunakan teknologi produksi padat modal dibandingkan dengan padat karya.

Seperti ditampilkan dalam Gambar 6, dengan hanya mempertimbangkan perubahan dalam pengeluaran pemerintah saja diidentifikasi bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 milyar rupiah, cenderung meningkatkan pendapatan pemilik modal secara keseluruhan di setiap sektor ekonomi hingga mencapai 493,1 juta rupiah, sedangkan pendapatan tenaga kerja di sektor ekonomi lainnya meningkat sebesar 333,6 juta rupiah.

Lebih lanjut, terlihat bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor industri tampak rendah. Padahal kedua sektor terakhir, *note bene* merupakan sumber mata pencaharian rumah tangga buruh tani dan golongan pendapatan rendah di kota.

Gambar 6. Multiplier Effect Pengeluaran Pemerintah terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Sektor dan Modal, Jawa Barat, 2003



Sumber : Mulyadi et, al (2006)

Temuan terakhir menunjukkan dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Temuan ini ditentukan dengan cara melakukan simulasi dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dengan basis *multiplier effect* yang sebagian telah disajikan sebelumnya. Hasil estimasinya diilustrasikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Estimasi Dampak Kenaikan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 35,05 % terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Barat

Sektor produktif	Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2003	Tambahan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja	Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja
	Aktual	Simulasi	Simulasi	Simulasi
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)=[(3)-(1)]/(1)
Pertanian	5 138 142	217 046	5 355 188	4.2%
Pertambangan dan Penggalian	121 511	3 390	124 901	2.8%
Industri Pengolahan	2 341 033	52 521	2 393 554	2.2%
Listrik, Gas & Air	40 938	1 578	42 516	3.9%
Bangunan	766 906	5 948	772 854	0.8%
Perdagangan, restoran & hotel	3 375 506	99 620	3 475 126	3.0%
Angkutan & Komunikasi	1 091 318	37 356	1 128 674	3.4%
Lembaga Keuangan & Sewa	82 119	3 323	85 442	4.0%
Jasa-Jasa	1 904 029	317 360	2 221 389	16.7%
Total	14 861 502	738 142	15 599 644	5.0%

Sumber : Mulyadi *et, al* (2006)

Mencermati Tabel 4, nampak bahwa perubahan pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan perubahan penyerapan tenaga kerja. Dengan menganggap pengeluaran pemerintah secara rata-rata meningkat setiap tahunnya sebesar 35,05 persen, hanya memberikan tambahan penyerapan tenaga kerja total sebesar 5 persen. (baris dan kolom terakhir). Dan secara sektoral, penyerapan tenaga kerja terbesar yang distimuli oleh pengeluaran pemerintah terjadi di sektor jasa-jasa. Di mana tambahan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 16,7 persen.

3.3 Hambatan dalam Mencapai Target Daya Beli di Jawa Barat

Berdasarkan kajian mengenai dampak pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan rumah tangga dalam pembahasan sebelumnya, maka

dapat dikemukakan proposisi yang menjadi faktor penghambat pencapaian target daya beli di Jawa Barat, yaitu :

- [1] Pengeluaran pemerintah lebih bias kepada rumah tangga kaya di perkotaan di Jawa Barat ;
- [2] Pengeluaran pemerintah memberikan stimulus *capital intensive* ke dalam sistem produksi sektor ekonomi di Jawa Barat yang berarti bias kepada pendapatan pemilik modal; dan
- [3] Berdasarkan hasil simulasi Mulyadi et al (2006) ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memberikan sedikit tambahan penyerapan tenaga kerja di perekonomian Jawa Barat.

Proposisi pertama terkait dengan lemahnya distribusi pendapatan secara personal oleh pemerintah, sedangkan dua proposisi terakhir mencerminkan lemahnya distribusi pendapatan secara fungsional melalui sistem produksi. (Lihat teori Hayami dalam sub bab 6.1).

Biasnya pengeluaran pemerintah terhadap rumah tangga kaya perkotaan lebih disebabkan oleh misalokasi program pengentasan kemiskinan. Mendeduksi hasil penelitian Sugema et. al (2005) yang terkait dengan efektivitas penyaluran dana kompensasi sebagai bentuk distribusi personal, misalnya Raskin (beras miskin), Beasiswa, Kartu Sehat dan Dana Bergulir memberikan informasi bahwa. Temuan-temuannya digali dengan cara pengamatan lapangan, studi literatur dan membuat *focus group discussion*. Hasil temuannya sangat mengagetkan, ternyata secara aktual penerima dana kompensasi itu persentasenya lebih besar diterima oleh penduduk non miskin (penduduk menengah dan kaya).

Jelas, bahwa dalam proses distribusinya telah terjadi misalokasi di lapangan yang salah satunya disebabkan oleh perilaku administrasi dan birokrasi pemerintah. Lebih mengerucut lagi Sudarno et. al (2004) menyimpulkan bahwa penyebab biasanya kebijakan pemerintah adalah adanya tata kelola yang buruk dalam pemerintahan, karena mereka telah membuktikan bahwa budaya birokrasi yang kondusif sangat menentukan di dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui jalur distribusi pendapatan personal.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika target peningkatan daya beli melalui perbaikan pendapatan rumah tangga miskin di perdesaan dan perkotaan sulit dicapai dalam tahap awal akselerasi IPM di Jawa Barat.

Kesulitan ini ditambah lagi dengan lemahnya daya dukung sistem produksi yang cenderung merespon perubahan permintaan akhir atas barang dan jasa dengan teknologi padat modal serta rendahnya dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Gejala di atas pada akhirnya akan menyulitkan akselerasi pencapaian IPM. Bagaimanapun daya beli memiliki peranan penting bagi rumah tangga di dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Rendahnya daya beli dapat mempersulit akses rumah tangga miskin terhadap jasa kesehatan dan pendidikan yang berpotensi untuk meningkatkan modal manusianya (*human capital*).

4 Simpulan dan Saran

Berdasarkan kajian mengenai teori pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta studi literatur mengenai keragaan makroekonomi Jawa Barat dengan pendapatan rumah tangga miskin, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

- [1] Di dalam sistem produksi, pendapatan rumah tangga miskin peka terhadap perubahan output sektor - sektor [a] pertanian, [b] industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau, [c] konstruksi, [d] perdagangan, hotel dan restoran, dan [e] jasa-jasa.
- [2] Dampak pengeluaran pemerintah lebih bias kepada kenaikan pendapatan rumah tangga golongan pendapatan atas di perkotaan dan pemilik modal, serta pengeluaran pemerintah hanya memberikan pengaruh kecil di dalam meningkatkan kesempatan kerja.
- [3] Biasanya pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan rumah tangga golongan pendapatan atas yang didistribusikan secara personal dan pendapatan pemilik modal yang didistribusikan secara fungsional melalui sistem produksi merupakan hambatan di dalam mencapai target daya beli rumah tangga miskin di Jawa Barat. Beberapa temuan empiris Sugema et, al (2005) dan Sudarno et, al (2004)] dapat mendukung kesimpulan matematis ini.

Karenanya, untuk mempercepat pencapaian target daya beli khususnya dan umumnya target indeks pendidikan dan kesehatan maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- [1] Untuk menciptakan distribusi pendapatan fungsional yang mengalir melalui sistem produksi agar mengarah pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan Jawa Barat, hendaknya Pemprov Jabar bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota mampu memberikan stimulus bagi pengembangan sektor [1] pertanian, [2] industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau, [3] perdagangan, hotel dan restoran, [4] konstruksi, dan [5] jasa-jasa. Karena diidentifikasi pendapatan rumah tangga miskin sangat peka terhadap perkembangan output kelima sektor itu.
- [2] Agar dampak pengeluaran Pemprov Jabar tidak bias kepada rumah tangga golongan pendapatan atas, maka harus ditingkatkan akuntabilitas dari setiap program pengentasan kemiskinan dan dengan cara menciptakan budaya birokrasi yang kondusif. Pemberantasan korupsi dalam berbagai level pemerintahan harus diprioritaskan.
- [3] Menata kembali keragaan sektor ekonomi di Jawa Barat dengan menekankan pengembangan sektor ekonomi yang cenderung padat karya dalam proses produksinya. Gagasan yang populer adalah revitalisasi sektor pertanian dan mengarahkan investasi di sektor-sektor yang teknologi produksinya terdapat hubungan komplementer antara modal dan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Annapoorani, R. 2002. *Concept and Estimation of Human Development Index. Human Development and Economic Development*. New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Rajouri Garden, Page 159 – 166.
- Ababa, Addis. 2004. “Aid, Public Investment, and pro-Poor Growth Policies.” Session 6-8. Quantitative Framework for Public Investment Policies in Ethiopia August 16-19.

- Datt, Ruddar. 2002. "The Concept and Measure of Human Development." Human Development and Economic Development. New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Rajouri Garden, Page xix – lii.
- Fakih, M. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gibson, Bill. 2003. *The Social Accounting Matrix. Economics*. UVM. August 1.
- Hayami, Yujiro. 2001, *Development Economics : From the Poverty to the Wealth of Nations*. Second Edition. New York. Oxford University Press.
- Pillai, G.K. *Human Development and Poverty : Some Policy Issues. Human Development and Economic Development. Rajouri Garden, New Delhi*. Deep & Deep Publication, LTD., Page 112 – 122.
- Sadoulet, E. and de Janvry, Alain. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis. The John Hopkins University Press Ltd. Baltimore, Maryland*. London.
- Subramanian, 2002. *Human Development and Economic Development. Rajouri Garden, New Delhi*. Deep & Deep Publication, LTD. Page 82 – 88.
- Sengupta, K. 2002. *Economic Growth and its Impact on Human Development in the Indian Economy. Human Development and Economic Development. Rajouri Garden, New Delhi*. Deep & Deep Publication, LTD. Page 167 – 185.
- Thurlow, James and Wobst, Peter. 2003. *Poverty-Focused Social Accounting Matrices for Tanzania. Trade and Macroeconomics Division International Food Policy Research Institute 2033 K Street, N.W. Washington, D.C. 20006, U.S.A.*
- Atih dan Yuhka. 2006. Kajian Sektor-Sektor Ekonomi yang Berdampak Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Jawa Barat : *Pendekatan Social Accounting Matrices*. BAPEDA Provinsi Jawa Barat. Bandung.

- Feder, Lau and Slade. 1987. *Does Agricultural Extention Pay ? The Training and Visit System in Northwest India*. American Journal Agricultural Economic (AJAE). Vol.69.N0.3.1987
- Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Mulyadi, Julia dan Yuhka. 2006. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Rumah Tangga, Penggunaan Faktor Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba. Bandung.
- Sudarno, R. Suryahadi, A dan Arifianto, A. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.
- Sugema, Oktaviani, Hasan, Aviliani dan Ritonga. 2005. *Dampak Kenaikan Harga BBM dan Efektivitas Program Kompensasi*. Jakarta. INDEF dan FEM-IPB.

B. Dokumen Pemerintah

- Arah Kebijakan Umum APBD Jawa Barat 2006.
- Basis Data Status Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dipublikasikan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2002.
- Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2002, dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2005.
- Millenium Development Goals : Realitas Pencapaian MDG di Indonesia 1999-2002, dipublikasikan oleh BPS Jabar, Januari 2006.
- Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2003 – 2007.